Relasi Simbiosis NU-Politik

Jawa Pos, Minggu, 14 Maret 2010

Oleh: Nur Syam

Jelang Muktamar NU di Makassar, 22-27 Maret 2010

MENJELANG muktamar NU kali ini, ternyata masih ada agenda yang sangat penting. Yakni, relasi antara NU sebagai jamiyah diniyah dan politik. Agenda ini penting diperbincangkan mengingat tarikan ke arah politik pada era demokratisasi dan keterbukaan seperti sekarang jauh lebih kuat.

NU sebagaimana saat didirikannya adalah jamiyah diniyah. Hanya karena tarikan politik yang sedemikian kuat, NU akhirnya tergoda untuk memasuki kawasan yang paling profan, yaitu kawasan politik. NU sebagai jamiyah diniyah didirikan pada 31 Januari 1926. Kemudian, pada 1952, NU menjadi partai politik. NU menjadi jamiyah diniyah selama 26 tahun sebelum terjun ke dunia politik.

Meski peran politik NU sangat fluktuatif, baik di masa Orde Lama maupun Orde Baru, tetap saja NU merupakan organisasi keagamaan yang paling banyak diramaikan orang karena aspek politik.

Jamiyah Sosial Keagamaan

NU sejak semula merupakan organisasi sosial keagamaan yang memiliki tugas memberikan panduan dan bimbingan agar perubahan kebutuhan umat maupun kaifiyah dalam memecahkan kebutuhan tersebut tidak mengakibatkan guncangan pada moral masyarakat dengan melakukan pembinaan akhlakul karimah.

Dengan demikian, NU di satu pihak terus melakukan perbaikan dan khidmahnya kepada umat dan bangsa, di pihak lain NU terus berusaha menjaga masyarakat agar berpegang teguh kepada sifat dan sikap yang mencerminkan akhlakul karimah.

Meski NU itu jamiyah diniyah, kelahirannya memang terkait dengan politik yang berkembang di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Ketika Abdul Azis bin Abdurrahman al Saud (1876-1953 M) berkuasa di Arab Saudi, seluruh kehidupan masyarakat Arab Saudi harus bersesuaian dengan komitmen keagamaan yang dikembangkan di sana.

Konstruksi ajaran agama Islam juga disesuaikan dengan keyakinan yang dimiliki Bani Saud. Tentu saja pola keberagamaan yang memberangus banyak ekspresi keberagamaan tersebut merisaukan umat Islam di tempat lain, termasuk umat Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di negeri ini.

Dalam konteks seperti itu, lahirlah NU sebagai jamiyah diniyah yang memang semula diancangkan untuk berkhidmah terhadap pemecahan masalah kebutuhan umat Islam di Nusantara. Jadi, meski dilahirkan dalam konteks seperti itu, NU sesungguhnya dilahirkan untuk mempertahankan Islam dan mengembangkan Islam sesuai dengan kenusantaraan dan lokalitasnya.

Hubungan Simbiosis

Hubungan NU dengan politik digambarkan sebagai berikut: "Hak berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota NU. Tetapi, NU bukan merupakan wadah bagi kegiatan politik praktis."

Penggunaan hak berpolitik dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang ada dan dilaksanakan dengan akhlakul karimah sehingga tercipta kebudayaan politik yang sehat. NU menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik, bersungguh-sungguh, dan bertanggung jawab.

Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi menegaskan, NU bukan partai politik dan tidak boleh berpolitik, juga tidak boleh menjadi partai politik dan tidak akan menjadi partai politik. Tapi, NU membutuhkan perlindungan politik. Kalau tidak ada perlindungan politik, nanti undang-undang atau kebijakan yang ada akan selalu merugikan NU. (30/05/2009). Perlindungan politik tersebut diperlukan demi terselenggaranya visi-misi perjuangan NU bagi bangsa dan negara.

NU sebagai jamiyah diniyah tentu tidak bisa melarang kiai, ulama, atau kadernya memasuki kawasan politik. Memasuki dunia politik praktis adalah hak setiap warga negara, termasuk warga NU. Tetapi, yang masih menyisakan masalah adalah bagaimana relasi pilihan politik warga NU tersebut dengan NU secara struktural. Kiranya, inilah problem yang paling rumit dalam relasi NU-politik.

Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, pilihan politik bercorak individual, bukan struktural. Artinya, seseorang memilih pilihan politik tidak difasilitasi organisasi. NU hanya menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk memasuki kawasan politik.

Kedua, NU melakukan kaderisasi secara berjenjang dalam rangka memetakan potensi aktivis NU. Penjenjangan pengaderan terhadap aktivis NU sangat penting agar secara jelas diketahui siapa memiliki kecenderungan ke mana.

Ketiga, menjadikan NU sebagai rumah bagi pemilih politik yang menyejukkan. Dukungan elite NU dalam pilihan politik sering menyebabkan polarisasi pada akar rumput. Karena itu, diperlukan cara yang arif dalam menyikapi pilihan politik warga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU. Semua warga NU harus merasa nyaman berada di dalam rumah besar NU.

Jika diibaratkan, NU merupakan sebuah rumah gedong yang pintunya banyak dan variatif. Ada pintu pemberdayaan dan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan, civil right dan kesetaraan, sosial dan politik, dan sebagainya. Tetapi, pintu untuk keluar masuk politik haruslah melalui satu pintu saja. Hal ini untuk menghindari polarisasi warga NU terkait dengan persoalan politik yang sangat tinggi.

Melalui pola relasi seperti ini, NU tidak selalu terjebak di dalam kubangan perpolitikan yang selalu menyisakan masalah. Relasi substantif NU dan politik akan dapat membangun citra NU sebagai jamiyah diniyah yang elegan dalam berhubungan dengan dunia politik yang powerfull.

Wallahu alam bi al shawab.

*). Prof Dr Nur Syam MSi , guru besar sosiologi dan rektor IAIN Sunan Ampel mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id